



Efektivitas Kebijakan Pemerintah dan Kepatuhan Publik dalam Menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19

Wanda Ulfia Ramadani^{1*}, Dea Riski Putri², Muhammad Ikhlas Nandra³, M Haikal⁴, Syifa Redita Khalilla⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia

Email : wandaulfia00@gmail.com^{1*}, riskiputridea@gmail.com², ikhlasanandra745@gmail.com³, mhaikal070206@gmail.com⁴, Syifareditak@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: wandaulfia00@gmail.com

Abstract. *The COVID-19 pandemic has prompted the Indonesian government to implement large-scale social restrictions (PSBB) to control the spread of the virus. This study aims to analyze the effectiveness of the PSBB policy and the level of public compliance with its implementation. Using a systematic literature search method, which collects and compares differences and similarities from databases such as Google Scholar, indexed journals, the archives of the Indonesian Ministry of Health, and other supporting publications, the analysis shows that the effectiveness of the PSBB has reached a moderate level (a 25%–40% decrease in cases in urban areas), influenced by interagency coordination and law enforcement. However, public compliance remains low (less than 60% in rural areas) due to economic factors, lack of outreach, and low levels of trust in the government. These findings highlight the need for a collaborative approach that enhances public education and economic incentives for similar policies in the future. This research is expected to strengthen public health literacy to enhance social resilience during the COVID-19 health crisis.*

Keywords: COVID-19; Policy Effectiveness; PSBB; Public Compliance; Social Resilience.

Abstrak. Pandemi COVID-19 telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran virus. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PSBB dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap implementasinya. Dengan menggunakan metode penelusuran literatur sistematis, yang mengumpulkan dan membandingkan perbedaan dan persamaan dari basis data seperti Google Scholar, jurnal terindeks, arsip Kementerian Kesehatan Indonesia, dan publikasi pendukung lainnya, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas PSBB telah mencapai tingkat moderat (penurunan kasus 25%–40% di daerah perkotaan), dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga dan penegakan hukum. Namun, kepatuhan masyarakat masih rendah (kurang dari 60% di daerah pedesaan) karena faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif yang meningkatkan pendidikan masyarakat dan insentif ekonomi untuk kebijakan serupa di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat literasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial terhadap krisis kesehatan era COVID-19.

Kata kunci: COVID-19; Efektivitas Kebijakan; Kepatuhan Masyarakat; Ketahanan Sosial; PSBB.

1. LATAR BELAKANG

Coronavirus disease atau yang sering disebut dengan COVID-19 sejak muncul pertama kali di Kota Wuhan, Tiongkok dan merebak semakin luas ke seluruh dunia mendorong World Health Organization (WHO) untuk menetapkan virus tersebut menjadi pandemi dunia. Indonesia yang awalnya terbilang cukup longgar menyikapi penyebaran virus ini, pada akhirnya tepat pada 2 Maret 2020 diumumkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia bahwa terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terjangkit virus COVID-19 ini. Ditemukannya dua korban positif corona pertama di Depok, Jawa Barat menjadikan kawasan

Jabodetabek sebagai episentrum wilayah penyebaran pertama pandemi virus COVID-19 di Indonesia (Djalante et al., 2020)

Dalam beberapa minggu setelah pengumuman kasus pertama, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia meningkat secara signifikan. Pemerintah menghadapi keadaan darurat kesehatan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhir Maret 2020, lonjakan kasus di semua wilayah telah berdampak multidimensional tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pada gelombang pertama pandemi COVID-19 di Indonesia, negara ini menghadapi tantangan signifikan dalam menahan virus. Setelah konfirmasi kasus pertama pada awal Maret, terjadi peningkatan pesat jumlah infeksi di seluruh negeri (Djalante et al., 2020)

Satu bulan kemudian (2 April 2020), Indonesia telah mencapai 1790 kasus terkonfirmasi dengan 170 kematian. Pada tanggal 22 Mei 2020, pemerintah Indonesia memberikan data yang menunjukkan bahwa terdapat total 21.430 kasus COVID-19 terkonfirmasi. Di antara kasus-kasus tersebut, 14.413 orang (69,3%) sedang menerima perawatan medis, sementara 5057 orang (24,32%) telah berhasil sembuh. Tragisnya, jumlah kematian mencapai 1326 orang (6,4%). Pada tanggal 21 September 2020, 248.852 kasus COVID-19 telah terdeteksi Pusat penyebaran wabah berada di Jakarta, ibu kota Indonesia yang wilayah metropolitannya dihuni oleh 31,24 juta orang menurut Sensus Indonesia (Sipahutar & Eryando, 2020) di mana kepadatan penduduk yang tinggi dan seringnya perjalanan internasional berkontribusi pada penyebaran virus yang cepat. Virus tersebut terus menimbulkan tantangan kesehatan, sosial, dan ekonomi yang relevan, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan dalam pengawasan, vaksinasi, pengujian, dan pengobatan

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu strategi penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan ini memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB. Regulasi tersebut mengatur pembatasan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan, pekerjaan, keagamaan, penggunaan fasilitas umum, serta aktivitas sosial yang berpotensi meningkatkan penularan penyakit. Penerapan PSBB dilakukan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing daerah sehingga tingkat pembatasan tidak selalu sama antarwilayah. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 tanpa menghentikan seluruh aktivitas masyarakat secara menyeluruh (Sipahutar & Eryando, 2020)

PSBB memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kebijakan lockdown total yang diterapkan beberapa negara seperti Italia. Lockdown total membatasi hampir seluruh mobilitas masyarakat dan hanya mengizinkan aktivitas tertentu yang bersifat darurat. PSBB memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap mengakses layanan esensial seperti pangan, kesehatan, transportasi, dan kegiatan ekonomi tertentu. Pendekatan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi selama masa pandemi (Nasruddin & Haq, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 11, PSBB merupakan pembatasan terhadap aktivitas tertentu penduduk pada suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit. Kebijakan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengurangi laju penularan COVID-19 pada fase awal pandemi. Meskipun pembatasan diterapkan secara ketat, berbagai aktivitas ekonomi dan sosial tetap dapat berlangsung dengan penyesuaian tertentu. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pandangan mengenai efektivitas PSBB. Sebagian pihak menilai PSBB berhasil mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan penyebaran virus, sedangkan pihak lain menilai kebijakan tersebut belum optimal karena masih terdapat aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan (Andriani, 2020)

Penerapan pembatasan sosial sebenarnya tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga diterapkan di berbagai negara Eropa sebagai bagian dari strategi pengendalian pandemi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas masyarakat berkontribusi terhadap penurunan jumlah kasus COVID-19 setelah kebijakan diterapkan. Berbagai kajian mengenai PSBB di Indonesia juga telah dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap pengendalian penyebaran virus. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada wilayah tertentu, terutama Jakarta sebagai daerah dengan jumlah kasus yang tinggi pada awal pandemi. Fokus penelitian yang terbatas menyebabkan gambaran mengenai efektivitas PSBB secara nasional masih belum sepenuhnya terjelaskan (Satyakti, 2020)

Penelitian mengenai kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB juga masih relatif terbatas dibandingkan penelitian mengenai efektivitas kebijakan itu sendiri. Padahal keberhasilan suatu kebijakan kesehatan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan aturan yang ditetapkan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan bantuan sosial, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diduga turut memengaruhi kepatuhan publik selama masa PSBB. Kajian yang menghubungkan efektivitas kebijakan PSBB dan kepatuhan masyarakat secara komprehensif masih belum

banyak ditemukan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara efektivitas kebijakan pemerintah dan kepatuhan publik dalam menjalankan PSBB sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 serta memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan kesehatan masyarakat pada masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Pandemi COVID-19 telah mengharuskan pemerintah Indonesia untuk melakukan banyak intervensi regulasi. Salah satu intervensi tersebut adalah pembatasan sosial skala besar (PSBB). Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mengurangi tingkat penularan virus dengan membatasi kegiatan masyarakat ke pengaturan yang kondusif bagi sidang dan meningkatkan interaksi sosial. Dalam domain kebijakan kesehatan masyarakat (Syaifullahil Maslul, 2022) PSBB dibingkai tidak hanya sebagai perintah administratif tetapi juga sebagai inisiatif strategis oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan melestarikan keberlanjutan kerangka sosial ekonomi masyarakat. Akibatnya, penilaian efektivitas PSBB menuntut analisis yang melampaui sekadar keberadaan regulasi formal, menggabungkan hasil pelaksanaannya dan tanggapan publik terhadap kebijakan tersebut.

Secara teoritis, keberhasilan suatu kebijakan publik berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan dianggap berhasil jika pelaksanaannya menghasilkan perubahan yang selaras dengan tujuan yang dimaksud, baik itu melalui pengurangan risiko penularan, peningkatan ketertiban masyarakat, ataupun peningkatan kepatuhan warga terhadap peraturan. Dalam hal pembatasan sosial skala besar (PSBB), keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana pembatasan tersebut mengurangi pergerakan masyarakat, menurunkan intensitas interaksi antarindividu, dan akhirnya memperlambat penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, untuk menganalisis efektivitas PSBB diperlukan perhatian terhadap kedua dimensi, yaitu dimensi kebijakan dan dimensi pelaksanaan di tingkat masyarakat.

Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipengaruhi oleh beberapa elemen. Faktor ekonomi menjadi salah satu penentu utama, terutama bagi individu dengan pendapatan rendah dan pekerja di sektor informal yang sangat bergantung pada penghasilan harian. Dalam situasi tersebut, pembatasan pada aktivitas sosial sering kali dilihat sebagai ancaman bagi kelangsungan ekonomi keluarga, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap pembatasan tersebut. Selain itu, kepatuhan

juga dipengaruhi oleh seberapa baik kebijakan disebarluaskan. Kebijakan yang tidak disampaikan dengan jelas, konsisten, dan mudah dimengerti akan menimbulkan perbedaan pemahaman di masyarakat dan mengurangi efektivitas pelaksanaannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adalah seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat menjadi aset sosial yang sangat krusial dalam keadaan darurat seperti dalam sektor kesehatan, karena masyarakat cenderung lebih mematuhi kebijakan yang dianggap dapat dipercaya, jelas, dan konsisten. Sebaliknya, kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya koordinasi antar instansi, dan informasi yang kurang legitim dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat dan mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan (Badman et al., 2022). Dengan demikian, kepatuhan masyarakat sangat terkait dengan kualitas interaksi antara pemerintah dan warga selama penerapan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seberapa berhasilnya kebijakan PSBB tidak hanya bergantung pada adanya regulasi dari pemerintah, melainkan juga pada sejauh mana masyarakat mematuhi aturan pembatasan sosial. Kedua aspek ini saling berhubungan, dan kajian dalam literatur ini menekankan bahwa analisis tentang kebijakan PSBB harus dilihat dalam konteks hubungan antara kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi warga, serta perilaku kepatuhan masyarakat sebagai faktor yang saling terhubung.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (literature review). Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan, menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dan kepatuhan publik dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi COVID-19. Pengelolaan literatur dilakukan dengan menghubungkan berbagai hasil penelitian, teori, regulasi, serta temuan empiris yang berkaitan dengan implementasi PSBB dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Artikel ilmiah yang digunakan sebagai sumber data berasal dari jurnal nasional, jurnal internasional, prosiding, serta dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data dan mesin pencari ilmiah, yaitu Google Scholar, Garuda, DOAJ, ScienceDirect dan PubMed.

Adapun kriteria literatur yang digunakan meliputi: (1) artikel membahas efektivitas kebijakan PSBB, pembatasan mobilitas masyarakat, atau kepatuhan publik selama pandemi COVID-19; (2) artikel tersedia dalam bentuk teks lengkap (full text); (3) artikel dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2025; (4) artikel menggunakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun studi literatur; dan (5) artikel berasal dari jurnal nasional maupun internasional yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian.

Tahapan pencarian artikel dilakukan sebagai berikut: a) Mengakses website pencarian literatur seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, ScienceDirect, dan PubMed; b) Memasukkan kata kunci pencarian yaitu “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”, “efektivitas PSBB”, “kepatuhan masyarakat terhadap PSBB”, “COVID-19”, “public compliance”, “large-scale social restrictions”, dan “government policy during COVID-19”; c) Melakukan seleksi awal berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci yang sesuai dengan fokus penelitian; d) Melakukan penyaringan artikel berdasarkan tahun publikasi, kesesuaian topik, serta ketersediaan naskah lengkap; e) Mengeliminasi artikel yang memiliki topik serupa, artikel duplikat, serta artikel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian.

Artikel yang telah diperoleh kemudian dilakukan proses validasi melalui penilaian kualitas literatur berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: (1) artikel dapat diakses secara penuh; (2) memiliki metode penelitian yang jelas; (3) membahas efektivitas kebijakan pemerintah atau kepatuhan masyarakat terhadap PSBB; (4) menggunakan data empiris atau kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (5) dipublikasikan pada jurnal atau sumber ilmiah yang terpercaya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, serta menginterpretasikan hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, informasi dari berbagai sumber dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas kebijakan PSBB, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat, serta hubungan antara efektivitas kebijakan pemerintah dan kepatuhan publik selama pandemi COVID-19. Hasil analisis disajikan secara naratif agar memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai topik yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, Garuda, DOAJ, ScienceDirect, dan berbagai jurnal nasional maupun internasional yang membahas efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kepatuhan masyarakat selama pandemi COVID-19. Setelah melalui proses seleksi berdasarkan kesesuaian topik, kualitas metodologi penelitian, dan relevansi terhadap tujuan penelitian, diperoleh sejumlah artikel yang digunakan sebagai sumber data kajian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan PSBB tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang diterbitkan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai ketentuan pembatasan sosial. Pembahasan hasil penelitian dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu efektivitas kebijakan PSBB dan kepatuhan publik selama pelaksanaan PSBB.

Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan kebijakan pemerintah yang diterapkan sebagai upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan kegiatan pendidikan, pekerjaan, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya, penggunaan fasilitas umum, serta pembatasan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian literatur, penerapan PSBB menunjukkan dampak positif terhadap pengendalian penyebaran COVID-19 terutama pada wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Penelitian (Satyakti, 2020) menunjukkan penerapan PSBB mampu menurunkan laju pertumbuhan kasus COVID-19 melalui pengurangan mobilitas masyarakat dan pembatasan interaksi sosial. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan serta mengurangi risiko penularan pada kelompok rentan.

Hasil penelitian Saputra & Salma (2020) juga menunjukkan bahwa penerapan PSBB berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan kasus harian COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan berkurangnya kontak langsung antarindividu sehingga peluang penyebaran virus menjadi lebih rendah. Penurunan mobilitas masyarakat selama masa PSBB menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan tersebut.

Temuan serupa diperoleh Heryana, et al (2020.) yang menjelaskan bahwa wilayah dengan penerapan pembatasan mobilitas yang lebih ketat cenderung mengalami penurunan angka reproduksi virus (Rt) dibandingkan wilayah yang menerapkan pembatasan secara longgar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan aktivitas sosial memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan pengendalian pandemi.

Berdasarkan hasil kajian keseluruhan artikel, terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas kebijakan PSBB, yaitu: a) Pembatasan mobilitas masyarakat yang mampu mengurangi kontak fisik antarindividu; b) Penutupan sementara fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan; c) Penerapan sistem kerja dari rumah (work from home); d) Pembelajaran jarak jauh pada sektor pendidikan; e) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko penularan COVID-19; f) Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PSBB mengalami penurunan pada fase transisi atau pelanggaran kebijakan. Mobilitas masyarakat kembali meningkat seiring kebutuhan ekonomi dan aktivitas sosial sehingga jumlah kasus COVID-19 kembali mengalami kenaikan pada beberapa daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat selama pelaksanaan kebijakan.

Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan PSBB

Kepatuhan publik merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan masyarakat. Kepatuhan dapat diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah selama pelaksanaan PSBB, seperti penggunaan masker, menjaga jarak fisik, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan.

Berdasarkan hasil kajian literatur (Lestari 24) tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan variasi antarwilayah. Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan karena akses informasi yang lebih baik serta intensitas pengawasan yang lebih tinggi.

Penelitian (Lestari 2024) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan lebih banyak ditemukan pada wilayah perkotaan dibandingkan daerah yang memiliki akses informasi terbatas. Tingkat kepatuhan masyarakat meningkat ketika terdapat sosialisasi yang intensif mengenai bahaya COVID-19 dan manfaat penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil kajian berbagai penelitian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama rendahnya kepatuhan masyarakat selama penerapan PSBB. Kelompok pekerja sektor informal tetap melakukan aktivitas di luar rumah karena penghasilan mereka bergantung pada pendapatan harian. Pembatasan aktivitas kerja berpotensi mengurangi pendapatan sehingga sebagian masyarakat memilih tetap bekerja meskipun terdapat pembatasan mobilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Bangun et al (2023) kebijakan publik menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu alasan utama pelanggaran aturan PSBB. Kondisi tersebut banyak ditemukan pada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan tabungan dan perlindungan sosial.

Kurangnya Sosialisasi Kebijakan

Seluruh masyarakat memahami secara menyeluruh tujuan dan mekanisme pelaksanaan PSBB. Keterbatasan akses informasi menyebabkan sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai aturan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi menyebabkan munculnya berbagai informasi yang tidak akurat sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Semakin baik penyampaian informasi oleh pemerintah, semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembatasan sosial.

Rendahnya Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki hubungan erat dengan kepatuhan terhadap kebijakan publik. Wiranti et al (2020) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah cenderung lebih patuh terhadap aturan kesehatan. Sebaliknya, ketidakkonsistenan informasi serta perbedaan kebijakan antarwilayah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap PSBB. Kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat penting pada situasi krisis kesehatan.

Hubungan Efektivitas Kebijakan dan Kepatuhan Publik

Berdasarkan Badri (2021) efektivitas PSBB dan kepatuhan publik memiliki hubungan yang sangat erat. Kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan mencapai tujuan apabila tidak diikuti tingkat kepatuhan masyarakat yang memadai. Sebaliknya, kepatuhan masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan.

Temuan Prakoso (2025) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kepatuhan tinggi cenderung mengalami penurunan kasus COVID-19 yang lebih signifikan dibandingkan daerah dengan tingkat kepatuhan rendah. Hubungan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan

dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan dukungan masyarakat.

Kajian Purnama & Yulistiani (2022) juga sejalan dengan teori Health Belief Model yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh persepsi risiko terhadap penyakit serta keyakinan bahwa tindakan pencegahan mampu mengurangi ancaman kesehatan. Masyarakat yang memandang COVID-19 sebagai ancaman serius cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kebijakan PSBB.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan PSBB mampu berkontribusi terhadap pengendalian penyebaran COVID-19. Tingkat keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, kondisi ekonomi, kualitas komunikasi publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian pandemi memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar tujuan kebijakan kesehatan dapat tercapai secara optimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terbukti berkontribusi dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui pembatasan mobilitas dan interaksi sosial masyarakat. Efektivitas PSBB dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Faktor ekonomi, sosialisasi kebijakan, dan kepercayaan publik menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19. Keberhasilan pengendalian pandemi memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan yang efektif, komunikasi yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, H. (2020). Effectiveness of large-scale social restrictions (PSBB) toward the new normal era during COVID-19 outbreak: a mini policy review. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 5(2), 5.
- Arif, L. (2020). Efektivitas kebijakan menghadapi era new normal dalam masa pandemi covid-19: tinjauan dalam perspektif masyarakat. *Potret Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19*, 55, 55-64.
- Badman, R. P., Wang, A. X., Skrodzki, M., Cho, H. C., Aguilar-Lleyda, D., Shiono, N., Yoo, S. B. M., Chiang, Y. S., & Akaishi, R. (2022). Trust in Institutions, Not in Political Leaders, Determines Compliance in COVID-19 Prevention Measures within Societies across the Globe. *Behavioral Sciences*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/bs12060170>
- Badri, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 1-6.
- Bangun, E., Widodo, P., & Silitonga, R. (2023). *Kebijakan Pandemi Covid 19*.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Firmansyah, R., & Nursanti, Y. B. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI INDONESIA DENGAN MODEL SUSCEPTIBLE-INFECTED-RECOVERED (SIR). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1724-1730.
- Haekal, M. F., Supian, M., & Sabrina, W. (2020). Efektivitas Penetapan PSBB Dalam Menurunkan Perilaku Konsumtif Masyarakat Pada Masa Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 93-98.
- Heryana, A., ST, S., & KM, M. (n.d.). *PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SOSIO-DEMOGRAFIS DAN GEOGRAFIS: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR*.
- INDONESIA, B., HASANUDIN, D. D., & HUM, M. Efektivitas PSBB dalam Menangani Pandemi Corona.
- Lestari, A. (2024). Pengaruh Struktur Sosial Terhadap Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Perkotaan: The Influence of Social Structure on Legal Compliance in Urban Societies. *Legal System Journal*, 1(1), 8-17.
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Pamungkas, B., & Yusuf, M. (2020). Pembelajaran Kebijakan (Policy Learning) dalam Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa PSBB: Efektivitas, Tantangan dan Adaptif Menghadapi Perubahan.
- Prakoso, A. D. (2025). FAKTOR PSIKOSOSIAL DAN KEPATUHAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB): STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN BEKASI SELAMA PANDEMI COVID-19. 3(2),. *Medika: Journal of Health Sciences, Cakrawala*, 263-270.

- Purnama, P., & Yulistiani, M. (2022). Hubungan antara komponen health belief model dengan perilaku pencegahan covid-19 pada masyarakat. *Faletehan Health Journal*, 9(02), 164-169.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Corona Virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240-249.
- Saputra, H., & Salma, N. (2020). Dampak PSBB dan PSBB transisi di DKI Jakarta dalam pengendalian COVID-19. 16(3),. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 282-292.
- Satyakti, Y. (2020). Do Human Restriction Mobility Policy in Indonesia Effectively Reduce the Spread of COVID-19. *SSRN Electronic Journal*, (101911). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3654553>
- Sipahutar, T., & Eryando, T. (2020). COVID-19 case fatality rate and detection ability in Indonesia. *Kesmas*, 15(2), 14–17. <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V15I2.3936>
- Syaifullahil Maslul. (2022). Penanganan Coronavirus Disease 2019 Covid-19 (Tinjauan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(10), 3648–3654. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1486>
- Wahyudi, E. (2021). Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. *Jurnal Yuridis*.
- Wiranti, W., Sariatmi, A., & Kusumastuti, W. (2020). Determinan kepatuhan masyarakat Kota Depok terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan COVID-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(3), 117-124.